

**TRANSFORMASI KOTA MALANG: DAMPAK KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN
CAGAR BUDAYA HINDIA BELANDA**

Mu'aliffa Wahyuning Arsana¹, Ike Wanusmawatie²

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Email Korespondensi: mualiffaa@gmail.com

Email: ikew@ub.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the impact of Agrarian policies, sugarcane, and decentralization on changes in government organization, economic development, and the development of Malang City during the Dutch East Indies Colonial period. The agrarian policy implemented by the Dutch East Indies Colonial government had an important role in the change of land ownership and land management at that time. In addition, the decentralization that has begun to be implemented affects the structure of local government and the dynamics of economic and infrastructure development in Malang City. In this context, various historical buildings built in the Dutch East Indies Colonial era are now implemented as cultural heritage and managed by tourism awareness groups under the auspices of the Youth, Sports, and Tourism Office. This research uses historical methods with a qualitative descriptive approach, utilizing colonial archives and government documents. The results of the study show that the colonial policies of the Dutch East Indies have a significant influence on the development of urban planning and the economy of Malang City which can still be felt today. In conclusion, the policies of Agrarian, Sugarcane, and Decentralization during the Dutch East Indies Colonial period provided a legacy that influenced the social, economic, and physical structure of the city. The implication of this research is the importance of historical development conservation and its sustainable management to support tourism and history education in Malang City.

Keywords: Agrarian Policy, Sugarcane, Decentralization, Cultural Heritage, Malang City.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dampak kebijakan Agraria, Tebu, dan Desentralisasi pada perubahan organisasi pemerintah, perkembangan ekonomi, dan pembangunan Kota Malang selama masa Kolonial Hindia Belanda. Kebijakan Agraria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memiliki peran penting dalam perubahan kepemilikan tanah dan pengelolaan lahan di masa itu. Selain itu, desentralisasi yang mulai ditetapkan mempengaruhi struktur Pemerintah lokal dan dinamika pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Kota Malang. Dalam konteks ini, berbagai bangunan bersejarah yang di bangun pada era Kolonial Hindia Belanda sekarang ditetapkan sebagai cagar budaya dan dikelola oleh kelompok sadar wisata di bawahnaungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan deskriptif kualitatif, memanfaatkan arsip kolonial dan dokumen pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kolonial Hindia Belanda memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan tata kota dan ekonomi Kota Malang yang masih bisa dirasakan hingga saat ini. Kesimpulannya, kebijakan Agraria, Tebu, dan Desentralisasi di masa Kolonial Hindia Belanda memberikan warisan yang mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan fisik kota. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya konservasi pembangunan bersejarah dan pengelolaannya yang berkelanjutan untuk mendukung pariwisata dan pendidikan sejarah di Kota Malang.

Kata kunci : Kebijakan Agraria, Tebu, Desentralisasi, Cagar Budaya, Kota Malang.

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan Kota Malang selama masa Kolonial Hindia Belanda sangat dipengaruhi oleh kebijakan Agraria, Tebu, dan Desentralisasi yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Kebijakan agraria mendukung eksploitasi sumber daya alam, terutama sektor perkebunan tebu. Kebijakan ini memberikan dampak politik liberal dan swastanisasi industri perkebunan terutama gula. Kebijakan Gula memberikan dampak peningkatan produksi dan ekspor industri gula. Kebijakan desentralisasi memberikan dampak pengelolaan daerah strategis komoditas secara mandiri dengan adanya otonomi daerah. Selain itu, dampak dari kebijakan kolonial Hindia Belanda berkontribusi dalam perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur kota. Kebijakan ini membuat lanskap Pemerintahan masyarakat dalam perekonomian Kota Malang saat ini. Dengan diterapkannya bangunan bersejarah sebagai cagar budaya terdapat peluang untuk eksploitasi peran kelompok sadar wisata dalam pengelolaan dan promosi warisan budaya. Hal ini sesuai dengan usaha Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang untuk mendorong pariwisata berkelanjutan dan memanfaatkan nilai sejarah dan budaya lokal sebagai daya tarik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak kebijakan Agraria, Tebu, dan Desentralisasi terhadap perubahan organisasi Pemerintahan perkembangan ekonomi Kota Malang selama zaman Kolonial Hindia Belanda. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis warisan budaya yang saat ini dikelola oleh kelompok sadar dan wisata pembangunan ekonomi lokal. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Peneliti menganalisis dalam temuan pengaruh kebijakan Kolonial Hindia Belanda dalam perubahan struktur organisasi Pemerintahan dampak terhadap perkembangan ekonomi dan infrastruktur yang berdampak hingga sekarang menjadikan bangunan peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menjadi cagar budaya yang dikelola oleh kelompok sadar wisata dapat mendukung pembangunan Kota Malang saat ini.

Penelitian mengenai dampak kebijakan Agraria dan Tebu di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang menunjukkan kebijakan yang berpengaruh struktur sosial, ekonomi. Penelitian oleh (Susatyo, 2006) di Karesidenan Semarang. Pada masa itu Hindia Belanda menjadi salah satu produsen gula terbesar di dunia. Wilayah utama penghasil gula di Karesidenan Semarang adalah Kendal karena memiliki tanah yang subur di dataran rendah. Secara ekonomi kebijakan ini mendorong perkembangan perkebunan tebu yang memenuhi pasar dunia dengan penggunaan lahan pertanian diubah menjadi lahan tebu yang mengakibatkan, perubahan mata pencaharian. Secara sosial, polarisasi ekonomi timbul dari monopoli perkebunan tebu memperkuat pertimpangan sosial karena masyarakat kehilangan akses lahan subur, sedangkan pengelola perkebunan besar memperoleh keuntungan besar. Ketidakadilan ini berlangsung selama penjajahan Hindia Belanda menciptakan kesenjangan sosial.

Penelitian oleh (Anwari, 2018) di Surabaya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Desentralisasi berdampak signifikan terhadap perubahan struktur organisasi Pemerintahan pembangunan infrastruktur. Penerapan status *Gemeente* Surabaya dipimpin oleh walikota yang didukung berbagai dinas atau departemen mulai dari pekerjaan umum, listrik dan energi, urusan China. Desentralisasi mendorong pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan dan perluasan jalan raya. Perkembangan Surabaya sebagai pusat industri dan bisnis dengan munculnya kawasan industri di Tanjung Perak dan Ngagel mempercepat kebutuhan akan jalan yang lebih besar dan pengaspalan yang selesai pada tahun 1920. Kepemilikan kendaraan mempengaruhi kebutuhan infrastruktur transportasi. Selain itu, kajian tentang cagar budaya bangunan kolonial Hindia Belanda di Bandung oleh (Brunner *et al.*, 2018) mengungkapkan pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung, Khususnya di jalan L.L.R.E Martadinata diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009. Aturan ini mengklasifikasi bangunan cagar budaya menjadi tiga yaitu kelas A tidak boleh diubah sama sekali, kelas B dapat diubah sesuai dengan elemen seirama, dan kelas C diizinkan perubahan dengan karakter bangunan asli tetap ada. Pengelolaan bangunan di sepanjang jalan adalah bangunan bersejarah penting.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi sejarah untuk menganalisis dampak kebijakan agraria, tebu, dan desentralisasi terhadap perubahan organisasi pemerintah, perkembangan ekonomi, dan Pembangunan Kota Malang pada zaman Kolonial Hindia Belanda. Penelitian melibatkan pendekatan etnografi untuk memahami pengelolaan bangunan cagar Budaya oleh kelompok sadar wisata di bawahnaungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang. Peneliti mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka yang mendalam dari sumber-sumber arsip kolonial, peraturan kebijakan Agraria, Tebu, dan Desentralisasi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Sumber yang digunakan meliputi buku Sejarah, artikel ilmiah, dan laporan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang relevan.

Analisis data dokumen kebijakan Agraria, Tebu, dan Desentralisasi pada masa kolonial Hindia Belanda dianalisis menggunakan pendekatan historis. Peneliti mengidentifikasi kebijakan yang mempengaruhi struktur organisasi pemerintahan, ekonomi, pembangunan, dan dampak jangka panjang yang masih terlihat pada pengelolaan cagar budaya saat ini. Untuk memastikan validitas data. Peneliti menggunakan Teknik membandingkan data dari berbagai sumber. Proses penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan 19 literatur, data sekunder, dan analisis data memakan waktu satu bulan. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak kebijakan kolonial Hindia Belanda terhadap perubahan organisasi pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan peran cagar budaya dalam pengembangan pariwisata lokal di bawah pengelolaan kelompok sadar wisata dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan Agraria dan Tebu pada era Kolonial Hindia Belanda memiliki dampak yang signifikan terhadap pembukaan politik liberal dan privatisasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Meskipun demikian, pengelolaan daerah strategis dan komoditas terutama tebu sering terabaikan karena sistem pemerintahan Hindia Belanda yang terpusat. Sistem sentralisasi ini membuat keputusan yang diambil sering tidak mencerminkan kebutuhan lokal. Pemerintah Hindia Belanda perlu memberlakukan desentralisasi.

Perubahan menuju sistem desentralisasi dianggap penting untuk meningkatkan pengelolaan daerah strategis. Penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi yang ditetapkan di Hindia Belanda berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi, khususnya dalam sektor utama tebu. Hal ini terlihat dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan adanya perhatian yang lebih besar perkembangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang telah dibahas oleh berbagai peneliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya (Saffanah, 2018) menunjukkan bahwa penghasilan gula di Pulau Jawa berkontribusi besar terhadap produksi gula, perkembangan ekspor Hindia Belanda antara tahun 1874 hingga 1914 menunjukkan peningkatan dalam ekspor gula. Perkembangan industri gula membuat Pulau Jawa menjadi penghasil gula utama dan memperkuat ketergantungan ekonomi di Hindia Belanda. Selain, perekonomian, pembangunan infrastruktur yang mendukung industri gula pun berkembang. Penelitian ini memperkuat temuan dalam Kebijakan Agraria dan Tebu dapat berpengaruh dalam perekonomian dan infrastruktur Kota Malang karena letak Kota Malang di Pulau Jawa yaitu Jawa Timur.

Hasil penelitian terdahulu oleh (Mulyadi, Witjaksono, & Fathony, 2020) membahas tentang sistem sentralisasi yang ditetapkan di Hindia Belanda menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat dengan realitas yang dihadapi oleh masyarakat di daerah. Hal ini menyebabkan kurang perhatian terhadap pengelolaan komoditas strategis yang penting bagi ekonomi dan kesejahteraan lokal. Perkembangan daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, pengetahuan, dan teknologi. Perubahan ini berdampak pada pemanfaat kawasan strategis yang jika tidak dikelola dengan baik akan menurunkan kualitas wilayah dan lepasnya kawasan strategis di Hindia Belanda. Hal ini sesuai dengan

Kebijakan Desentralisasi yang bisa menciptakan tata kelola daerah yang lebih baik di daerah strategis komoditas terutama Kota Malang.

Kebijakan Desentralisasi dalam konteks Kota Malang dianggap lokasi strategis selain perekonomian yaitu pemukiman dan hiburan. Kota Malang memiliki titik geografis yang pas karena kota kecil dengan udara yang sejuk dan dikelilingi oleh pegunungan. Dalam pengelolaan kota Pemerintah lokal membangun infrastruktur mendukung untuk pemukiman dan hiburan. Infrastruktur Hindia Belanda tetap kokoh hingga saat ini membuat Pemerintah Kota Malang menetapkan peninggalan Hindia Belanda sebagai cagar budaya. Penelitian ini menunjukkan keberadaan bangunan cagar budaya yang dikelola oleh kelompok sadar wisata di bawah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata berperan penting dalam melestarikan warisan budaya dan mendukung ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh (Rukayah, 2020) yang menyatakan bahwa pengelolaan warisan budaya dapat berkontribusi ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Cagar budaya berpotensi untuk pariwisata *Heritage* untuk perkembangan pariwisata di Kota Malang.

Jika dibandingkan dengan penelitian *kontemporer*, penelitian ini sejalan dengan berkelanjutan tentang dampak jangka panjang kebijakan kolonial Hindia Belanda pada perkembangan di Indonesia terutama di Kota Malang. Namun penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menghubungkan transformasi dengan upaya pelestarian cagar budaya dan pengelolaan oleh masyarakat lokal yang belum banyak dibahas dalam literatur. Kebijakan Kolonial Hindia Belanda yang berkaitan dengan Agraria, Tebu, dan Desentralisasi tidak hanya mempengaruhi perubahan struktur Pemerintah dan perkembangan ekonomi di masa lalu, tetapi juga mempengaruhi pengelolaan dan diintegrasikan warisan cagar budaya dalam upaya pembangunan pariwisata Kota Malang.

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan Kolonial Hindia Belanda secara aktif mempengaruhi perekonomian, struktur organisasi pemerintahan, dan pembangunan infrastruktur di Kota Malang. Peneliti merumuskan bahwa dampak kebijakan tersebut mempercepat transformasi tata kelola dan pertumbuhan kota.

Kebijakan Agraria dan Tebu

Pada tahun 1830, Hindia Belanda menerapkan pemerintahan sentralisasi dengan sistem paksa untuk mendapatkan barang dan komoditas. Pada tahun 1870, sistem ini berubah dengan munculnya ekonomi liberal yang melibatkan sektor swasta dan mendorong pertumbuhan investor membuat Hindia Belanda sebagai negara ketiga dengan jumlah investor terbesar di dunia. Pada tahun 1865, Menteri Penjajahan Frans van de Putte mengusulkan RUU mengenai pemakaian tanah oleh swasta selama 99 tahun (*Erfpacht*), mengakui hak tanah pribumi (*Eigendom*), dan mengubah kepemilikan tanah komunal menjadi pribadi. RUU ini ditolak karena pengakuan penuh atas tanah pribumi, dan Frans van de Putte dicopot dari jabatannya.

Tabel 1: Ekspor Hindia Belanda pada Tahun 1874-1914 (dalam jutaan Gulden)

Komoditi	1874	1914	Perubahan
Gula	50	183	+266
Kopi	68	23	-66
Teh	3	27	+800
Rempah	6	14	+133
Tembakau	11	64	+482
Kopra	0	61	+
Timah	5	41	720
Minyak Bumi	0	137	++
Karet	0	27	++
Asal Perkebunan			
Jawa & Madura	144	360	+150

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

462

Indexed



SINTA 5



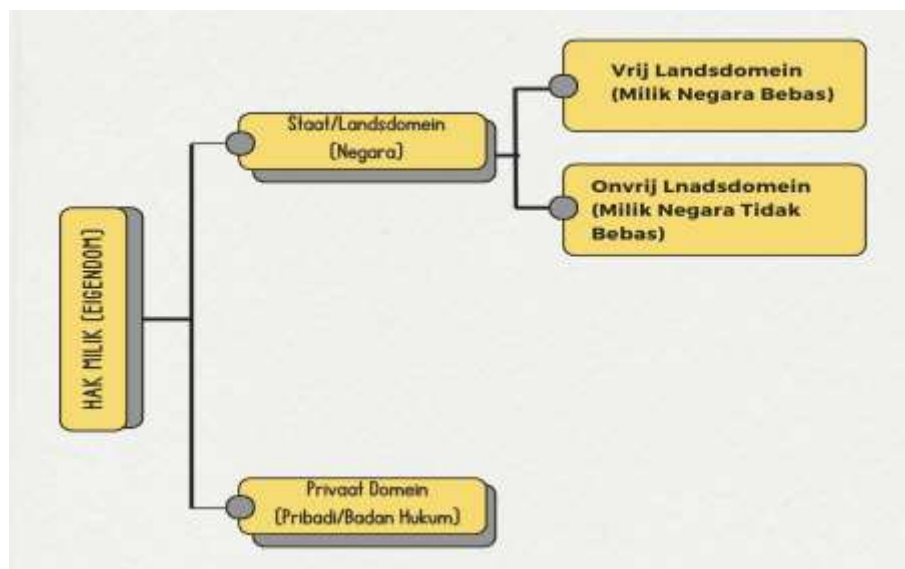
Komoditi	1874	1914	Perubahan
Luar Jawa	25	324	+1.196
Hindia Belanda	169	685	+305

Sumber: (Masyrullahushomad & Sudrajat, 2019).

Selama periode 1874 hingga 1914, terjadinya perubahan signifikan pada berbagai komoditas di Hindia Belanda. produksi gula meningkat dari 50 menjadi 183. Produksi kopi mengalami penurunan dari 68 menjadi 23. Produksi teh melonjak drastis dari 3 menjadi 27. Rempah-rempahan mengalami peningkatan terbesar dari 5 menjadi 14. Tembakau mengalami pertumbuhan besar dari 11 menjadi 64. Kopra meningkat dari 0 ke 61. Timah mengalami peningkatan luar biasa dari 5 menjadi 41. Minyak bumi dan karet meningkat menjadi 27 dan 137. Peningkatan yang paling menonjol adalah industri tebu. Dari segi perkebunan Pulau Jawa dan Madura meningkat dari 144 menjadi 360. Produksi di Luar Jawa meningkat tinggi dari 25 menjadi 324. Secara keseluruhan Hindia Belanda meningkat dari 169 menjadi 685 pada tahun 1874 hingga 1914.

Pada tahun 1866, Pemerintah Hindia Belanda melakukan penelitian di Pulau Jawa tentang hak tanah pribumi dengan judul *Eindresume van het Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op de Grond* disingkat *Eindresume* selama satu tahun. Sebelum penelitian selesai, Kementerian Penjajahan de Waal mengajukan RUU baru yang membatasi pemakaian tanah oleh swasta selama 75 tahun dan pengambilan tanah yang kepemilikannya kurang jelas oleh Pemerintah Hindia Belanda. RUU ini disetujui dan disahkan pada 9 April 1870 pada Pasal 52 dari *Wet op de Indische Staatsregeling* UU Agraria (*Agrarische Wet*) dan UU Gula (*Suiker Wet*). UU tersebut membuka peluang swasta dalam berinvestasi dalam perkebunan di Hindia Belanda terutama di Pulau Jawa pada daerah penghasil gula seperti Karesidenan Cirebon, Semarang, Madiun, Kediri, Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Ekspor hasil perkebunan Hindia Belanda tumbuh signifikan antara tahun 1874-1914 (Masyrullahushomad & Sudrajat, 2019).

Gambar 1: Struktur Kepemilikan Tanah



Sumber: Masyrullahushomad & Sudrajat, 2019

Kebijakan Desentralisasi

Pada tahun 1830, di bawah Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, Hindia Belanda menerapkan sistem tanam paksa (*Cultuurstelsel*) dengan keuntungan pertama sebesar 823 gulden. Pada 1 Mei 1855

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

463

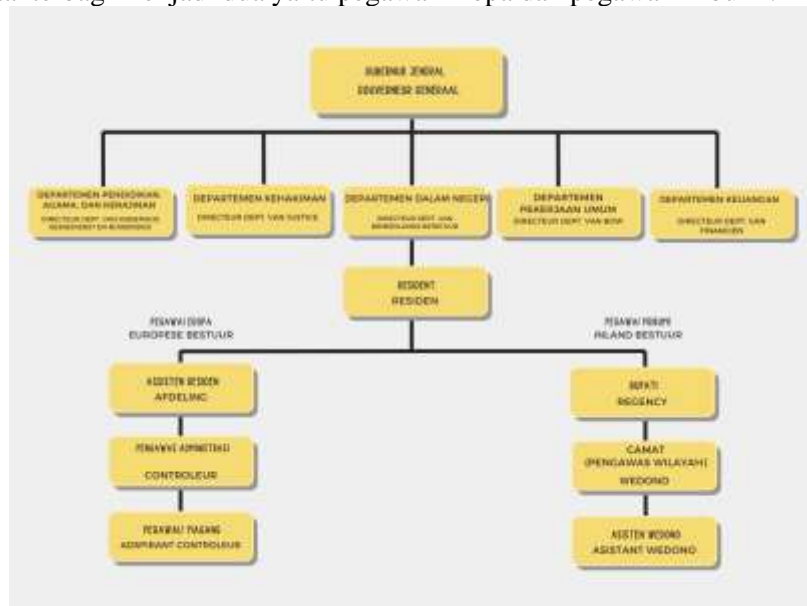
Indexed



SINTA 5



Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Regeringsreglement* (R.R.). Peraturan mengenai sistem Pemerintah sentral sesuai dengan Pasal 71 R.R. Berdasarkan Peraturan Hindia Belanda pemerintahan dipimpin oleh Gubernur Jenderal dibantu oleh 4 direktur yaitu 1) Departemen Dalam Negeri untuk administrasi dan wilayah, 2) Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan untuk mengelola pendidikan, agama, dan kerajinan, 3) Departemen Pekerjaan Umum mengelola pembangunan infrastruktur, 4) Departemen Keuangan mengelola keuangan negara, 5) Departemen Kehakiman yang menangani hukum. Struktur Pemerintah terbagi menjadi dua yaitu pegawai Eropa dan pegawai Pribumi.



Gambar 2 Struktur Sentralisasi Hindia Belanda
Sumber : (Kurniawan, 2006)

Karesidenan dikelola oleh pegawai Eropa dengan beberapa kabupaten yang dipimpin oleh asisten residen dibantu oleh kepala distrik dan pembantu atau pegawai distrik. Struktur organisasi Pemerintah di tingkat kota oleh walikota dan kabupaten oleh bupati (Kurniawan, 2006). Namun, sistem ini menghadapi permasalahan yaitu Pemerintah kurang memperhatikan masyarakat pribumi daerah dalam sistem paksa dan luasnya kekuasaan Gubernur Jenderal. Disisi lain perkembangan ekonomi liberal dan terjalin hubungan baik dengan Kerajaan Belanda dengan beberapa kemajuan telegraf tahun 1856, perkembangan layanan pos tahun 1862, pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869, dan kemajuan kapal pesiar Kerajaan KPM (*Koninklijk Paketvaart Maatschappij*) pada tahun 1890. Seiring waktu, tanam paksa dianggap kurang efektif dalam ekonomi politik karena kekhawatiran hilangnya wilayah strategis komoditas Hindia Belanda karena munculnya semboyan Hilangnya Indonesia berarti Bencana (*Verloren Rampspoed Geboren*).

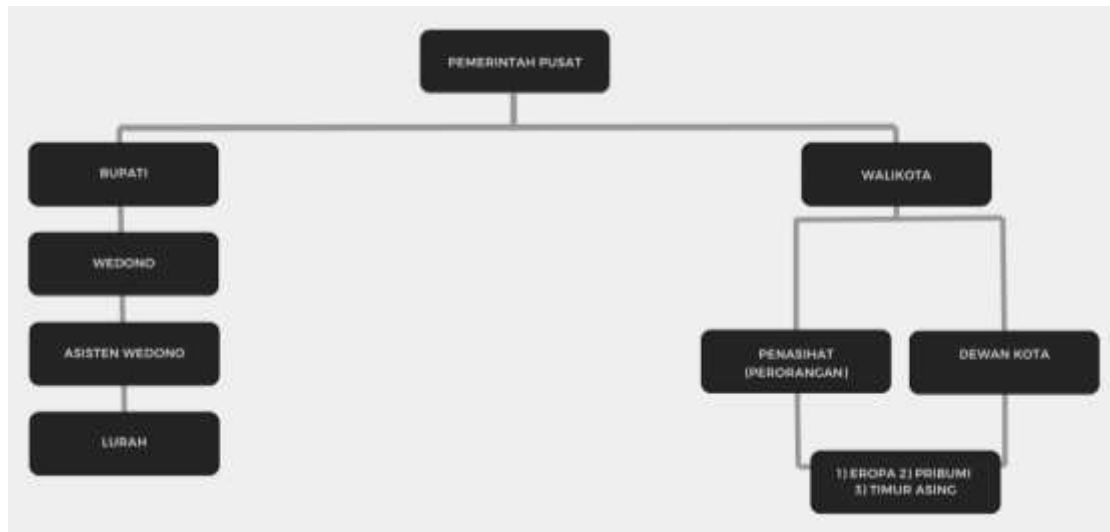
Seorang tokoh anonim berinisial A.N mengkritik Pemerintahan Hindia Belanda karena tidak sesuai dengan gambaran wilayah yang damai dan harmonis (*Mooi Indie*). Kenyataannya di Batavia kotor dan kacau karena tidak ada lembaga otonom daerah. Kritik ini ditulis dalam artikel berjudul "Varia" di *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie* pada tahun 1858. Pada tahun 1880, L.W.C Keuchenius, W.K. Baron van Dandem tahun 1881, J.Th Cramer dan S.Van Houten tahun 1887 menyuarakan gagasan desentralisasi ketatanegaraan di Hindia Belanda. Ketika L.W.C Keuchenius menjabat Menteri Penjajahan sistem desentralisasi belum terwujud. Barulah ketika Gubernur Jenderal Van Der Wijck mengajukan RUU Desentralisasi yang dirancang oleh J.Th Cramer dan dilanjutkan oleh Menteri Penjajahan berikutnya. Ratu Wilhelmina menanggapi hal ini dengan merancang kebijakan Etis berlandaskan etika Kristen dan kewajiban Belanda terhadap rakyat daerah strategis di Hindia Belanda bukan sekedar sumber keuntungan.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Implementasi politik etis diwujudkan dalam RUU Desentralisasi yang memperbaiki struktur Pemerintah daerah termasuk perencanaan, administrasi, keuangan, dan otoritas kotamadya (*Gemeente*). Pada tahun 1903 RUU desentralisasi diajukan oleh Kementerian Penjajahan A.W.F Idenburg dan diterima dengan penambahan pasal 68 point a,b,c pada UUD 1854 (*Regeringsreglement*) yang memberikan wewenang pengelolaan keuangan dan tanggungjawab daerah secara mandiri.

Gambar 3: Struktur Desentralisasi Hindia Belanda



Sumber: Kurniawan, 2006

Pada 23 Juli 1903 diterbitkan *Wethoudende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch-indie* atau UU Desentralisasi 1903 sebagai UU otonomi pertama di Hindia Belanda diterbitkan di *Nederlandsche Staatsblad* tahun 1903 No 219 dan *Indische Staatsblad* No 329. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Decentralisatie Besluit* 1905 yang mengatur pembentukan, kedudukan, dan kewenangan dewan (*Raad*) dalam mengelola keuangan daerah. *Local Raden Ordonantie* menetapkan struktur dan kewenangan dewan yaitu Dewan Wilayah (*Gewestelijke Raad*), Dewan Lokal (*Plaatselijke Raad*), dan Dewan Kota (*Gemeenteraad*). Kota (*Gemeente*) dan Kabupaten memiliki status setara akan tetapi pemilihan pimpinan kota harus seorang Belanda dan anggota terdiri dari orang Belanda, Pribumi, dan Timur Asing. Dewan kota dan kabupaten memiliki wewenang untuk membuat peraturan, mengelola kota, memungut pajak, menjual, dan menyewakan properti. (Hestiliani, 2019)

Tabel 2: Daftar Kotamadya (Gemeente)

No	Nama (Tahun)	Luas	Staatsblad	No	Nama (Tahun)	Luas	Staatsblad
1	Batavia (1905)	155,4	204	17	Sukabumi (1914)	10,6	310
2	Master Cornelis (Jatinegara) (1905)	28,7	205	18	Malang (1914)	18,8	297
3	Bogor (1905)	21,69	208	19	Salatiga (1917)	-	266
4	Cirebon (1906)	10,4	122	20	Binjai (1917)	3	-
5	Bandung (1906)	28,6	121	21	Tebing Tinggi (1917)	3,8	-
6	Semarang (1906)	99,4	120	22	Tanjung Balai (1917)	1,1	-

No	Nama (Tahun)	Luas	Staatsblad	No	Nama (Tahun)	Luas	Staatsblad
7	Tegal (1906)	11,6	123	23	Pemantang Siantar (1917)	8,5	-
8	Pekalongan (1906)	12,2	124	24	Mojokerto (1918)	5,3	324
9	Magelang (1906)	18,12	125	25	Pasuruan (1918)	13,75	320
10	Surabaya (1906)	82,8	149	26	Probolinggo (1918)	12,6	322
11	Blitar (1906)	6,4	150	27	Madiun (1918)	9,7	326
12	Kediri (1906)	21	148	28	Bukit Tinggi (1918)	5,2	-
13	Padang (1906)	11,5	-	29	Sawah Lunto (1918)	-	-
14	Palembang (1906)	21,75	-	33	Banjarmasin (1919)	-	-
15	Makassar (1906)	15,1	-	31	Manado (1919)	-	-
16	Medan (1909)	15,8	-	32	Ambon (1919)	-	-
Sumber : (Masyrullahushomad & Sudrajat, 2019), (Hestiliani, 2019), (Kurniawan, 2006)							

Pada zaman Kolonial Hindia Belanda, politik etis dimulai pada tahun 1901 dengan fokus pada pendidikan, irigasi, dan migrasi. Program irigasi modern meningkatkan pertanian dan perkebunan di Malang menjadikan pusat industri untuk komoditas seperti, teh, kopi, tembakau, dan gula, sekolah modern berperan penting dalam menghasilkan tenaga kerja terampil untuk industri. Perkembangan industri gula di Malang ditandai dengan berdirinya dua pabrik gula yaitu Pabrik Gula Kebon Agung 1905 oleh Tan Tjwan pengusaha asal Surabaya dan Pabrik Gula Kerebet pada 1906 oleh Pemerintahan Hindia Belanda. kedua pabrik ini berkontribusi pada pertumbuhan pesat Malang di Jawa Timur dengan didorong kebijakan Pemerintah terhadap industri gula (Saffanah, 2018).

Perkembangan Kota Malang

Perkembangan ini menjadikan Malang sebagai wilayah komoditas strategis sehingga meningkatnya migrasi dan urbanisasi untuk orang Eropa swasta membuka lahan dan orang pribumi untuk bekerja. Berkembangnya penduduk dan kompleksitas kebutuhan di daerah membuat Pemerintah Hindia Belanda di Batavia kewalahan karena cakupan kekuasaan yang sangat luas. Pemerintah Hindia Belanda merubah sistem pemerintahan desentralisasi untuk wilayah strategis komoditas terutama gula. Setelah, perubahan status Kotamadya (*Gemeente*) Malang yaitu pemisahan wilayah Kabupaten Malang menjadi dua yaitu Kota Malang dan Kabupaten Malang. Dulu, Kota Malang adalah kecamatan (distrik) dari Kabupaten Malang. Dalam sistem desentralisasi Kota Malang memiliki wewenang sebagian otonomi daerah. Hal ini disebabkan perubahan status yang bertahap dalam pemenuhan administrasi dan adanya hutang sebesar 550.00 florin untuk pembangunan saluran air yang mengharuskan penyerahan wewenang sementara pada Karesidenan Pasuruan. Karesidenan Pasuruan memegang Pasuruan, Bantul, dan Malang.

Struktur organisasi Pemerintah daerah kolonial Hindia Belanda pada bagian asisten residen (kota) dan bupati (kabupaten) memiliki tugas dan wewenang yang sama sebagai pemimpin kota atau kabupaten. Kantor bupati berada di timur dan alun-alun kota sedangkan kantor asisten residen berada di selatan alun-alun. Lokasi Kota Malang sangat strategi untuk tempat hunian dan hiburan. Setelah adanya UU Desentralisasi terjadi perubahan struktur organisasi dan pemisahan daerah kota Malang dengan Kabupaten Malang. Hal ini karena kota Malang strategis untuk tempat hunian dan hiburan bagi pekerja khususnya orang Eropa di Surabaya untuk menikmati akhir pekan di Kota Malang.

Walikota Malang era Hindia Belanda (1914-1942)

Masa Kolonial Hindia Belanda Kota Malang dipimpin oleh 3 asisten residen dan 4 walikota Malang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

466

Indexed



yaitu F.L Broekveldt (1914-1918), JJ. Coert (1918-1919), dan H. G. C. L. de la Parra (1919) di bawah Karesidenan Pasuruan dan dipimpin oleh asisten residen. Setelah status kota resmi menjadi daerah otonom sepenuhnya dan pemilihan walikota resmi secara hukum yaitu H.I Bussemaker (1919-1929), Ir. E.A Vooneman (1929-1933), Ir. P.K.W Lakemar (1933-1936), dan J.H Boestra (1936-1942). Walikota (*burgemeester*) dalam mengelola kota dibantu oleh anggota dewan terdiri dari orang Belanda asli, Pribumi, dan tokoh masyarakat daerah lainnya. Dewan Kota dan Dewan Kabupaten yang memiliki wewenang membuat peraturan, yang saat ini dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Berikut tabel walikota Kota Malang selama masa Kolonial Belanda.

F.L Broekveldt

F.L Broekveldt adalah seorang asisten residen Pasuruan yang ditunjuk untuk memimpin Kota Malang. Pada masa kepemimpinan F.L Broekveldt ditandai dengan pembentukan awal dewan kota yang terdiri dari 8 orang Eropa mewakili 2.500 penduduk Eropa, 2 orang Pribumi mewakili 40.000 penduduk Pribumi, dan 1 orang China mewakili 4.000 penduduk China. Dewan kota melakukan rapat pertama pada 6 April 1914 yaitu pembentukan komisi keuangan, teknik, dan perundang-undangan. Pada akhir tahun dewan kota mengeluarkan peraturan pajak dengan penarikan 40% pribadi, pajak perkebunan, dan pajak keramaian. Pada tahun 1915 F.L Broekveldt merancang perluasan kota atau *Bouwplan* yang dirancang oleh Ir. Herman Thomas Karsten untuk merancang bangunan Kota Malang seperti kota Eropa, jalan, taman, dan lapangan dengan tujuan menciptakan aktivitas publik. Pemerintah Kolonial Kota Malang mengeluarkan peraturan pasar dengan tujuan mengatur tata kelola pasar dalam aspek kebersihan, perdagangan, dan ketertiban di are pasar yang terus berkembang.

F.L Broekveldt mengeluarkan peraturan pajak anjing, peraturan susu, peraturan pemotongan hewan, peraturan kepemilikan dokar, peraturan lalu lintas, dan peraturan standar pembangunan modern (Yulianti, 2012). Pada tahun 1917, sebelum pembubaran dewan kota karena perubahan status kota Malang. Dewan kota merancang penyelenggaraan pemilu dan pengangkatan walikota resmi secara hukum desentralisasi yang segera disahkan dengan berpengalaman dalam tata kelola. Dewan kota juga mengusulkan pembentukan dewan kota dengan jumlah tambahan dengan perwakilan penduduk Eropa sebanyak 9 orang, 4 orang pribumi, dan 2 orang timur asing sesuai dengan Staatsblad 1917 No. 587. Dewan kota mengesahkan peraturan pemukiman elit (*Oranjestad*) dalam pengelolaan papan nama dan nomor rumah. Pada tahun 1918 perencanaan *Bouwplan* I dengan membangun pemukiman elit untuk golongan Eropa (*Oranjestad*), memperluas bangunan dengan membeli sawah, dan penetapan harga tanah. Selain itu, peraturan pegawai sipil (*Ambtenarenverordening*) (Boerstra, 1939)

Dalam pembangunan di era kepemimpinan F.L. Broekveldt yaitu pembangunan pemukiman berdasarkan UU Wilayah (*Wijkenstelsel*) dalam pemisahan pemukiman penduduk Eropa di daerah berada di Taloon, Tongan, Sawahan, Kajoetangan, Oro-oro Dowo, Tjelaket, Klodjen Lor, Rampal. Penduduk pribumi di daerah Kebalen, Toemenggoenggan, Djodipan, Taloon, Klodjen Lor. Penduduk China di daerah Kota Lama dan sekitar Pasar Besar. Penduduk Arab di Kauman. Sektor ekonomi berada di Kajoetangan. Terdapat baskala kecil dan pasar milik swasta di Pecinan. Adanya jalur kereta api dengan jadwal 4 kereta per hari Malang-Surabaya untuk mendukung distribusi hasil pertanian dan mobilitas umum. Layanan publik dikelola oleh swasta yaitu telepon dengan 275 sambungan. Terdapat skala kecil. Restoran di Pecinan, dan Kebudayaan asli masih minim.

Permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan air di masa itu masyarakat masih ketergantungan dengan sumur. Pada tahun 1915, Pemerintah Kolonial Kota Malang berupaya meningkatkan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam akses air bersih, dengan mendirikan perusahaan ledeng yang memanfaatkan sumber air. Pada 1 Agustus 1915, air bersih mulai disuplai dari mata air Karang dan Sumber Sari untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Selain itu, Pemerintah juga membangun perusahaan ANIEM (*Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteit Maatschappij*) yang menyediakan listrik untuk wilayah Hindia Belanda, khususnya Kota Malang.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Dalam sektor hiburan, bagi penduduk Eropa berada di *Societeit De Harmonie* yaitu tempat perkumpulan seni dan ilmu pengetahuan (*Kunst en Wetenschappen*), gedung bioskop sederhana di gedung *Societeit Concordia*, dan Hotel Jansen-Jensen dengan masing-masing memiliki 50 kamar sederhana. Pembangunan Palace Hotel (sekarang Hotel Pelangi) dilakukan dengan membongkar Hotel Jansen-Jensen untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan akan tempat hiburan seiring pertumbuhan populasi di Malang, di mana kawasan Kebalen menjadi pusat prostitusi di tempat umum seperti stasiun dan restoran. Pada tahun 1916, Javasche Bank didirikan di sekitar Alun-Alun, yang kini dikenal sebagai kota lama, menjadi cikal bakal Bank Indonesia dan mencerminkan pentingnya Kota Malang dalam perekonomian dan perdagangan Jawa Timur. Lokasi strategisnya menjadikannya institusi keuangan utama untuk masyarakat dan pengusaha kolonial, dengan arsitektur khas kolonial yang memperkuat posisi Malang sebagai pusat urban yang berkembang pesat. Pada tahun 1917, meningkatnya urbanisasi menyebabkan munculnya masalah sosial, seperti kelompok pengemis dari Kudus, Blitar, dan Kesamben yang tinggal di tempat umum, sementara Pemerintah Kolonial Kota Malang mengambil alih pasar Pecinan untuk perbaikan (Saffanah, 2018).

JJ. Coert dan H. G. C. L. de la Parra

Kota Malang di bawah kepemimpinan oleh JJ. Coert selama kurang lebih 10 bulan karena kondisi kurang sehat. Akan tetapi beliau sempat mengeluarkan kebijakan dalam perluasan kota penghapusan otonomi desa daerah kota dan Hak Istimewa Kotamadya atas Tanah Gubernemen (*Gemeentelijke Voorkeurrecht op Gouvernements-gronden*) yaitu hak perluasan dengan hak istimewa. Selain itu, pengadaan pemilu dewan yang dipilih oleh masyarakat pertama kali dan penambahan jumlah dewan anggota 9 orang Eropa, 4 orang pribumi, dan 2 orang china. Sektor ekonomi juga pengembangan pasar.

Di bawah kepemimpinan JJ. Coert, pembangunan infrastruktur di Kota Malang mencakup beberapa aspek penting. Dalam sektor transportasi, jalur kereta api dibangun oleh Pemerintah kolonial untuk meningkatkan konektivitas. Di bidang ekonomi, Pemerintah melakukan pembangunan dan perbaikan pasar, termasuk membuka pasar baru di Klojen serta memperbaiki pasar Pecinan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah. Untuk mendukung pemukiman elit Eropa, Pemerintah meluncurkan proyek *Bouwplan I*. Namun, kondisi kesehatan JJ. Coert yang memburuk menyebabkan dewan kota digantikan sementara oleh H. G. C. L. de la Parra selama empat bulan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur lainnya (Boerstra, 1939).

H.I Bussemaker

Kepemimpinan H.I Bussemaker terpilih menjadi walikota pertama Kota Malang dan pergantian status kota besar dengan otonomi daerah sepenuhnya dipegang oleh Pemerintah kota. Pelantikan H.I Bussemaker dilaksanakan pada 1 Juli 1919 dan peningkatan anggota dewan kota terdiri dari 9 orang Eropa, 4 orang Pribumi, dan 2 orang China dengan total 15 anggota dewan kota. Masa awal kepemimpinan perluasan kota dengan 4 wilayah administrasi sesuai dengan SK Pemerintah Hindia Belanda dalam *Staatsblad* 1919 No 514. Dalam rapat dewan kota mengusulkan alokasi dana gaji Walikota Malang dan pembentukan komisi yaitu keuangan, teknik, dan legislatif. Pada tanggal 17 Juni 1921 diresmikan lambang Kota Malang berupa dua ekor singa Belanda (*De Nederlandsche Leeuw*) dan bersemboyan dalam Bahasa Latin oleh De. De Haan dari Batavia yang berbunyi Malang *Nominor Surnsum Moveor* yang berarti Malang Kotaku Maju Tujuanku (Yuliati, 2012).

Pada tahun 1922 adanya pemberlakuan UU *Bestuurshervormingswet* pada 6 Februari 1922 melalui *Staatsblad* No 216 tahun 1922 yang bertujuan untuk melaksanakan desentralisasi secara luas dan menyeluruh. Dalam implementasinya dilaksanakan pembubaran dewan kota dan status Kota Malang beralih dari Kotamadya (*Gemeente*) menjadi kota besar (*StadsGemeente*) yang akan berlaku pada tahun 1929. Pada tahun 1924 persetujuan pembangunan stadion dan pembentukan komite olahraga juga eksploitasi sumber daya sendiri sebesar 4% dari dana kota oleh dewan kota. Pada tahun 1926 pembubaran

dewan kota karena perubahan status *Gemeente* menjadi *StadsGemeente* melalui *StaatsGemeente Ordenantie*. Perubahan ini membuat kota Malang menjadi ibukota Karesidenan Malang dengan membawahi Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Selain itu wewenang penuh daerah otonom. Pada tahun 1928, Pemerintah kota memberikan kekuasaan desentralisasi kepada kawedanan di Malang melalui *Staatsblad* No 316 tanggal 9 Agustus 1928 yaitu kekuasaan pengelolaan saluran air minum, got, pemeliharaan jalan, tempat umum, rumah potong hewan, dan pemakaman.

Di bawah kepemimpinan H.I. Bussemaker, pembangunan infrastruktur di Kota Malang dimulai dengan pembukaan pasar Klojen dan perubahan batas wilayah desa seperti Penanggoengan, Kasri, Bareng, Tandjoeng, dan Mergan, yang kini menjadi bagian dari Kota Malang seluas 1.820 hektar (Boerstra, 1939). Pada tahun 1919, dibangun kompleks pemakaman khusus untuk penduduk Eropa, dan pengelolaan pasar diambil alih oleh Pemerintah kota. Selanjutnya, pada tahun 1920, dilakukan perbaikan jaringan jalan yang signifikan dengan fokus pada pengaspalan dan penataan yang lebih terstruktur, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemakaman juga dipisah menjadi tiga kategori: Eropa, pribumi, dan timur asing, dengan pemakaman Eropa yang awalnya di Klojen dipindahkan ke daerah Sukun. Pada tahun 1921, dibuka Pasar *Chineesche Kamp* dengan biaya 139.29,6 f, yang terdiri dari 42 pedak dan pasar *Sophia straat* untuk tumbuhan dan hewan. Tahun 1922 ditandai dengan penyelesaian pembangunan kawasan pusat pemerintahan baru di *Gouverneur-Generaal Buurt*. Kemudian, pada tahun 1924, Pemerintah kota membangun stadion olahraga untuk penduduk Eropa, yang dilanjutkan dengan pembangunan stadion Kota Malang (*Gemeentelijke sportpark*) pada tahun 1926, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga. Pembangunan bioskop modern pertama, *Flora Cinema*, juga menjadi bagian dari upaya pengembangan infrastruktur di kota ini.

Ir. E.A Vooneman

Ir. E.A Vooneman diangkat menjadi walikota pada 1 Mei 1929. Penetapan status kota Malang menjadi *StadsGemeente* pada 1 Januari 1929 dengan pemilihan anggota dewan kota dan penambahan dewan kota sesuai dengan *Staatsblad* 1929 No. 98 dengan perwakilan 9 orang Eropa, 6 orang pribumi, dan 2 orang timur asing. Karten dijadikan penasihat resmi (*adviseur*) Kota Malang untuk perencanaan kota (Kurniawan, 2006). Pembentukan asisten atau wakil walikota pertama (*wethouder*) dengan tunjangan awal f.100,-/bulan dan turun menjadi f.75,- pada tahun 1934. Pemerintah mendirikan badan pengelolaan tanah milik Pemerintah (*Gemeentelijke Grondbedrijf*). Perubahan desa menjadi bagian dari urusan kota. Pada tahun 1930 terjadinya pemberhentian politik etis dan krisis ekonomi global menyebabkan penurunan dalam industri gula akibat persaingan internasional dan mempengaruhi keuangan pembangunan kota. Politik etis ini tidak mempengaruhi Kota Malang karena urbanisasi terus meningkat terutama orang Jawa sebanyak 62,5%, orang Madura sebanyak 37,4%, dan 0,91% terdiri dari orang Manado, Maluku, dan Melayu. Dalam sektor pemukiman Lembaga I.E.V Complex Housing meminta subsidi dari Dewan Kota untuk pembangunan rumah (Choirunnisak & Afiyanto, 2022). Sektor transportasi MSM menghasilkan pendapatan utama dari pengangkutan dan penumpang dengan keuntungan dari komoditas pertanian kopi dan tebu sejak tahun 1911-1930 (Wicaksono, 2017).

Pada tahun 1932 stadion olahraga disewakan oleh Pemerintah kota kepada *Holland Training Consie* (*Soerabaiasche Harddraverij en Renvereening*) untuk pelatihan pacuan kuda dan penyewaan kepada *Hippische Sportvereniging* Malang. memperlihatkan pengelolaan yang dalam pelayanan fasilitas olahraga dan meningkatkan keterlibatan komunitas berbagai kegiatan. Selain itu usulan jumlah anggota dewan kota sebelumnya 17 orang menjadi 21 orang untuk memperkuat representasi masyarakat dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan (Boerstra, 1939).

Di bawah kepemimpinan Ir. E.A. Voorneman, pada tahun 1929, penyelesaian perencanaan *Bouwplan* I-VIII dilakukan oleh arsitek Ir. Herman Thomas Karsten, serta berhasilnya percobaan pembangunan 12 rumah sewa f.35 oleh dewan kota. Pada saat yang sama, *Nederlands-Indie Escompto Bank* dibangun di sebelah barat *Javasche Bank*. Voorneman juga meluncurkan *Geraamteplan* sebagai rencana perluasan kota,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

namun ditolak oleh Pemerintahpusat karena dianggap kurang jelas, sehingga diberikan waktu dua tahun untuk memperbaikinya. Meskipun krisis global menyebabkan penurunan di sektor pertanian, sektor pariwisata dan jasa berkembang, termasuk industri tembakau Bentoel yang menciptakan masyarakat modern baru. Pertambahan penduduk dan perumahan baru di sekitar jalur trem mempengaruhi tata ruang kota, tetapi tidak menghentikan kemajuan Malang, yang tetap terlihat dari pembangunan Escompto Bank dan pemindahan stasiun. Pada tahun 1932, pariwisata semakin berkembang dengan penataan bangunan kota yang bervariasi seperti villa, perumahan kecil, dan kampung terbuka untuk menarik wisatawan. Hingga tahun 1934, sektor ekonomi juga maju dengan pembangunan pasar di berbagai wilayah, termasuk Bunulrejo, Kebalen, Oro-Oro Dowo, Embong Brantas, dan Lowokwaru.

Ir. P.K.W Lakemar

Kepemimpinan Ir. P.K.W Lakemar peraturan mengenai tunjangan untuk asisten atau wakil walikota (wethouder) mengalami pengurangan dari f.100 menjadi f.75 per bulan. Di tengah perubahan ini, Ir. Herman Thomas Karsten meluncurkan rencana tambahan global yang bertujuan untuk mengarahkan pertumbuhan kota selama 25 tahun ke depan. Rencana ini mencakup berbagai aspek, seperti perluasan dan perbaikan gedung, serta pembangunan jalan baru yang akan meningkatkan infrastruktur kota. Selain itu, ada juga perhatian terhadap pembenahan ruang terbuka untuk keperluan olahraga dan rekreasi, yang menjadi bagian integral dari strategi perluasan kota tersebut. Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kota secara keseluruhan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Ir. E.A. Voorneman pada tahun 1929, rencana pembangunan *Bouwplan I-VIII* oleh arsitek Ir. Thomas Karsten selesai. Pada tahun yang sama, dewan kota berhasil membangun 12 rumah sewa dengan biaya f.35. Selain itu, Nederlands-Indie Escompto Bank didirikan di sebelah barat Javasche Bank. Walikota Voorneman juga meluncurkan Geraamteplan untuk perluasan kota, tetapi rencana tersebut ditolak oleh Pemerintahpusat karena dianggap kurang jelas, dengan waktu dua tahun untuk diperbaiki. Krisis global berdampak pada sektor pertanian, namun industri tembakau Bentoel serta sektor pariwisata dan jasa mengalami pertumbuhan, menciptakan masyarakat yang lebih modern. Kepadatan penduduk yang meningkat mendorong pembangunan perumahan baru di sekitar jalur trem, yang mempengaruhi tata ruang kota tanpa menghambat kemajuan. Pada tahun 1932, peningkatan pariwisata dilakukan dengan membedakan tipe bangunan seperti villa, perumahan kecil, dan kampung terbuka untuk menarik wisatawan. Sektor ekonomi juga berkembang dengan berdirinya pasar di berbagai wilayah, termasuk Bunulrejo, Kebalen, Oro-Oro Dowo, Embong Brantas, dan Lowokwaru hingga tahun 1934.

Pada kepemimpinan Ir. P. K. W. Lakemar pada tahun 1933, dibangun Maconieke Lodge di Tjermeplein sebagai salah satu pengembangan infrastruktur di Kota Malang. Selain itu, ditetapkan zona industri baru di dekat Blimbing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, bersamaan dengan pengembangan jaringan jalan yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Pada masa itu, sebuah foto J.P. Coen Plein diambil dari gedung Balaikota Malang, memperlihatkan perkembangan kota secara visual (Kurniawan, 2006).

J.H Boestra

Kepemimpinan J.H. Boestra ditandai dengan upaya proaktif dalam pengembangan wilayah Kotamadya Malang. Pada 13 September 1937, Boestra mengajukan permohonan kepada Provincialen Raad van Oost-Java untuk mengubah batas wilayah demi mendukung pengembangan yang lebih baik. Namun, hingga 1938, keputusan mengenai permohonan tersebut belum juga diterima. Di tahun yang sama Lambang resmi kota Malang disahkan oleh Gubernur Jenderal *Nederlandsch-Indië* (Boerstra, 1939). Untuk meningkatkan potensi pembangunan kota, pada tahun 1940, ia mengusulkan perluasan wilayah Kotamadya Malang menjadi 54,76 km². Setelah melewati krisis ekonomi tahun 1930-an, Hindia Belanda menjadi fokus ekspansi Jepang selama Perang Dunia II (Choirunnisak & Afiyanto, 2022). Pada masa

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

470

Indexed

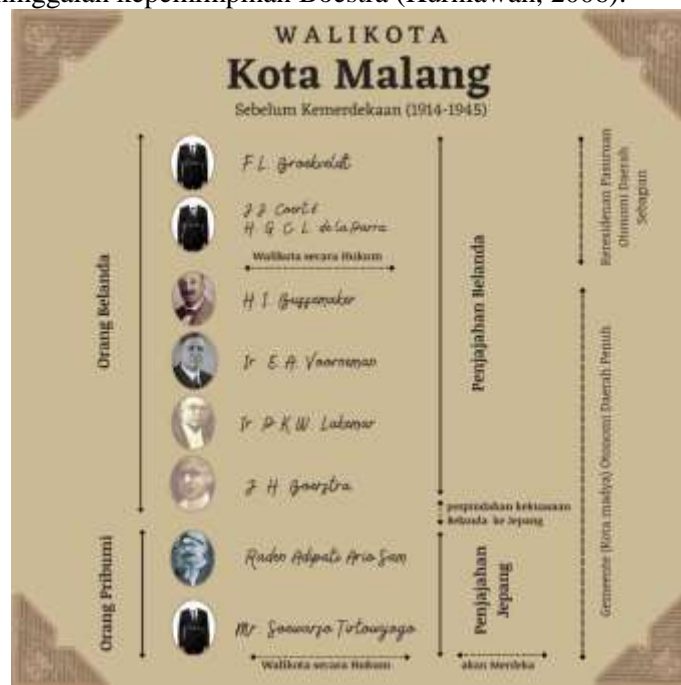


SINTA 5



pendudukan Jepang, wilayah Kotamadya Malang kembali diperluas menjadi 78,42 km², mencakup Kecamatan Blimbing dan Kedung Kandang, yang menunjukkan komitmen Boestra terhadap perkembangan kota meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan.

Pada masa kepemimpinan J.H. Boestra, beberapa proyek penting dilakukan di Malang. Pembangunan Theresi Kerk di depan Boeringplein menjadi salah satu simbol religius utama. Selain itu, Nederland-Indie Handelsbank didirikan, memperkuat sektor ekonomi kota. Di bidang militer, kompleks Rampal dibangun, mencakup lapangan latihan dan barak untuk keperluan militer. Fasilitas rekreasi dan olahraga juga diperluas dengan pembangunan lima *societeit*, termasuk *Concordia*, *Militaire Societeit van Manschappen*, dan *Societeit Taman Persaudaraan*. Fasilitas olahraga terbesar di kawasan Bergenbuurt juga menjadi bagian penting dari peninggalan kepemimpinan Boestra (Kurniawan, 2006).



Gambar 4 Walikota Malang Sebelum Merdeka
Sumber : (Malang, 2024) & Diolah oleh Penulis, 2024

Pembangunan oleh Ir. Herman Thomas Karsten

Beliau adalah arsitektur terkenal di Hindia Belanda dengan perencanaan tata kelola kota. Karsten diakui sebagai Bapak Perencanaan Kota Indonesia. Karya arsitektur ada di daerah Semarang, Surakarta, Yogyakarta, dan Medan. Karsten menuntut ilmu arsitektur di Universitas Teknologi Delft dengan konsentrasi permasalahan perumahan. Karsten percaya perencanaan harus mementingkan kepentingan publik dengan integrasi ekonomi, sosial, dan budaya untuk menciptakan kota yang harmonis. Menurutnya tempat tinggal berdasarkan kelas sosial bukan ras. Karsten menjadi penasihat tata kota di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan (Yuliati, 2012). Karsten membuat konsep untuk Kota Malang dengan *Garden City* yaitu penyatuan lingkungan ruang terbuka dengan lingkungan buatan manusia. Pembangunan Kota Malang menjadi andalan Karsten hingga dalam pameran Internasional tahun 1937. Karsten dalam perencanaan pembangunan *Bouwplan* I-VIII dan rencana tambahan global dengan memperhatikan aspek fisik daerah pegunungan, desain kawasan terpusat ke Balai Kota, melindungi daerah hijau, pembatasan sosial dengan pembagian kawasan kelas sosial, dan tata ruang yang memperhatikan kesehatan juga berkelanjutan. Karsten menjadi penasihat (*adviseur*) Kota Malang pada Tahun 1929-1940 dengan pembangunan *Bouwplan* di tahun 1929-1935 dan pembangunan Rencana Tambahan Global tahun 1935-1940.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Tabel 3: Perencanaan *Bouwplan* I-VIII dan Rencana Tambahan Global oleh Ir. Herman Thomas Karsten

<i>Bouwplan</i>	Lokasi	Luas	Pembangunan
I	Kawasan Celaket dan Rampal (Utara)	12.939 m ²	Ditetapkan oleh dewan kota pada Tanggal 13 April 1916 dan dilaksanakan 18 Mei 1917 untuk pembangunan pemukiman Eropa (<i>Oranjebuurt</i>) atau kawasan oranye dan nama jalan sesuai nama anggota Kerajaan Belanda
II	Alun-Alun Bunder	15.547 m ²	Ditetapkan oleh dewan kota tanggal 26 April 1920 dan dilaksanakan 1922 dengan membangun daerah pusat pemerintahan di daerah Alun-alun Bunder (J.P. Coen Plein) dan pembangunan lainnya Hotel Splendid, Sekolah HBS/AMS, Stasiun Kota Baru, pemukiman panglima militer. Daerah ini bernama Para Gubernur Jenderal(<i>Gouverneur-Generaal Buurt</i>)
III	Pemakaman Sukun	3.740 m ²	Ditetapkan 26 Agustus 1919 dan 26 April 1920 dengan membangun areal pemukiman orang Eropa di Sukun dengan mobilitas daerah yang rendah
IV	Celaket-Lowokwaru	41.401 m ²	Pembangunan pemukiman kelas menengah ke bawah, pemakaman Samaan, sekolah, dan lapangan olahraga. Nama jalan menggunakan nama sungai
V	Jalan Ijen <i>Boulevard</i>	16.768 m ²	Pembangunan pemukiman (<i>Bergenbuurt</i>) atau pegunungan dengan tipe Villa daerah barat Kayutangan berdekatan dengan stadion olahraga
VI	Alun-Alun (Pecinan)	220.901 m ²	Pembangunan sebelah Selatan Alun-alun dan Sawahan Timur-Barat disebut daerah pulau (<i>Eilandenbuurt</i>) dengan pembangunan pasar Pecinan dan terminal bus.
VII	Jalan Ijen dan Oro-Oro Dowo	252.948 m ²	Pembangunan lanjutan pemukiman elit tetapi lebih besar dan pacuan kuda dikenal daerah gunung (<i>Bergenbuurt</i>)
VIII	Kota Bedah	179.820 m ²	Pembangunan areal industri yaitu industri korek api dengan berdekatan stasiun kereta api dan trem uap di daerah Timur dan Selatan pusat Kota di daerah Bedah dan Blimbing.
Rencana Tambahan Global	-	-	Pembangunan jaringan jalan utama, rencana taman dan ruang luar, juga rencana jaringan kereta api dan Tram. Pembangunan jaringan transportasi diberi nama kota-kota dari Barat dan Utara
Sumber : Mulyadi, Witjaksono, & Fathony, 2020			

Daur Hidup Organisasi Pemerintah Kota Malang Hindia Belanda

Organisasi memiliki struktur, Kebudayaan, dan strategi pengembangan di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan organisasi harus berkembang dan bertahan dengan pemahaman prinsip daur hidup organisasi. Daer hidup organisasi terdiri dari kelahiran, pertumbuhan, kematangan, penurunan, dan kematian. Berikut ini adalah daur hidup Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Kota Malang.

Penerbit:

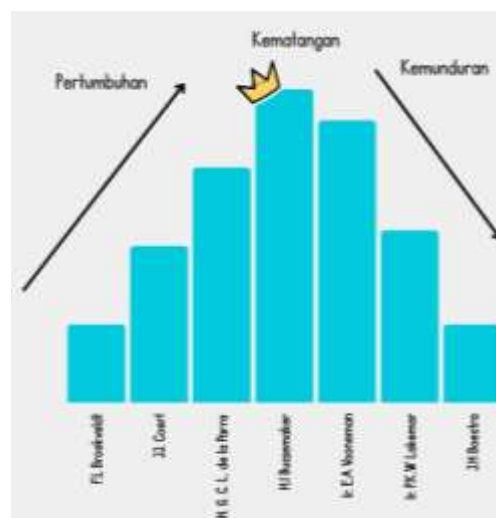
LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Kota Malang mengalami perkembangan di masa kepemimpinan F.L Broekveldt (1914-1918), J.J. Coert (1918-1919), dan H. G. C. L. de la Parra (1919) di bawah Karesidenan Pasuruan dan dipimpin oleh asisten residen. Pembangunan masih tahap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kota Malang seperti pembangunan pemukiman, listrik, dan saluran air. Selain itu, adanya perencanaan pembangunan *Bouwplan* I-VIII. Masa itu, Kota Malang masih berstatus Kotamadya (*Gemeente*) dengan otonomi sebagian karena proses administrasi dan keuangan yang masih belum terselesaikan. Setelah Kota Malang memperoleh status daerah otonom sepenuhnya dan secara resmi dipimpin oleh walikota H.I Bussemaker (1919-1929), Kota Malang mengalami kemajuan pesat. Pembangunan *Bouwplan* sudah berjalan sehingga infrastruktur dan tata kelola kota berkembang.

Di bawah kepemimpinan Ir. E.A Vooneman (1929-1933) pelaksanaan tahap akhir Pembangunan *Bouwplan* I-VIII. Pada masa itu adanya krisis ekonomi global dalam industri gula membuat pembangunan sedikit terkendala. Akan tetapi Kota Malang masih berkembang pesat. Kepemimpinan Ir. P.K.W Lakemar (1933-1936) adanya perkembangan industri selain tebu yaitu tembakau dan program pembangunan global tambahan dalam membangun atau memperbaiki infrastruktur. Akan tetapi Hindia Belanda mengalami penurunan keuangan. Kepemimpinan J.H Boestra (1936-1942) Hindia Belanda sudah keluar dari krisis ekonomi dan perluasan Kota Malang. Tetapi, adanya ekspansi Jepang di Perang dunia II yang menandakan berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda.

Gambar 5: Daur Hidup Organisasi Kolonial Hindia Belanda Kota Malang



Sumber : (Malang, 2024), (Boerstra, 1939), Diolah oleh Penulis, 2024

Cagar Budaya Kota Malang

Cagar budaya adalah peninggalan budaya berbentuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya di daratan atau air yang perlu dilestarikan karena mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan Kebudayaan berdasarkan penempatannya. Penentuan cagar budaya berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya yaitu dengan kriteria berusia minimal 50 tahun, mewakili bentuk minimal 50 tahun, adanya nilai khusus (sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan Kebudayaan), dan memiliki nilai Kebudayaan bangsa. Berdasarkan geografi bisa ditetapkan cagar budaya dengan kriteria minimal terdapat 2 situs berdekatan, lanskap budaya karya manusia minimal berusia 50 tahun, fungsi minimal berusia 50 tahun, memiliki pengaruh besar di masa lalu, adanya bukti lanskap budaya, dan lapisan tanah mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil (Mulyadi, Fathony, & Priskasari, 2020).

Berdasarkan jumlah cagar budaya per 31 Desember 2022, Indonesia memiliki 4.760 cagar budaya

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

473

Indexed



SINTA 5



dari 34 provinsi dan provinsi Jawa Timur memiliki 391 cagar budaya. Cagar budaya tiap provinsi yang ditetapkan Menteri per tahun berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan total 196 cagar budaya di Indonesia dan provinsi Jawa Timur sebanyak 24 cagar budaya. Sedangkan, cagar budaya yang ditetapkan menteri per tahun berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya di Indonesia sebanyak 953 dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 44 cagar budaya (Chabibie & Permanawiyat, 2023).

Kota Malang memiliki banyak warisan peninggalan dari masa Hindia Belanda, khususnya antara tahun 1914-1942. Di bawah kepemimpinan walikota H.I Bussemaker (1919-1929), kota ini mengalami masa kejayaan dengan peningkatan industri gula dan selesainya pembangunan infrastruktur modern yaitu *Bouwplan*. Kawasan cagar budaya di Kota Malang terbagi menjadi 5 kawasan yaitu kawasan Celaket, Tugu, Kayutangan, Pecinan, dan Jalan Ijen Boulevard. Bagunan Kolonial Hindia Belanda pada kawasan Celaket berjumlah 156 buah. Pada kawasan Tugu berjumlah 147 buah. Pada kawasan Kayutangan berjumlah 270 buah. Pada kawasan Pecinan berjumlah 93 buah. Pada kawasan Jalan Ijen Boulevard berjumlah 379 buah. Ruang Terbuka Hijau (RTH) ada 15 buah dan 1 pemakaman Belanda di Sukun (Mulyadi, Fathony, & Priskasari, 2020).

Tabel 4: Cagar Budaya Kolonial Hindia Belanda Kota Malang

Kawasan	Jumlah
Celaket	156
Tugu	147
Kayutangan	270
Pecinan	93
Jalan Ijen Boulevard	379
RTH	16
Total	1.061

Sumber : (Mulyadi, Fathony, & Priskasari, 2020)

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya. Berdasarkan peraturan tersebut, Cagar Budaya meliputi benda alam atau buatan manusia yang berhubungan erat dengan Kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Pemerintah memperbolehkan pemanfaatan Cagar Budaya untuk kegiatan agama, sosial, ekonomi, penelitian, dan pengembangan. Masyarakat dapat berperan dalam pengamanan Cagar Budaya dengan memperhatikan pemanfaatan untuk kepentingan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, agama, Kebudayaan, dan pariwisata. Promosi pelestarian Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat dengan tujuan memperkuat identitas budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu mengintegrasikan lingkungan sekitar dan menciptakan objek wisata baru.

Pada Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Sesuai dengan Pasal 17, Cagar Budaya bisa dikelola menjadi industri pariwisata dengan pantauan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Pasal 18 dan 19 tentang penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi, dan bimbingan teknis untuk mendukung daya tarik wisata dan kawasan pariwisata berkelanjutan. Sesuai dengan sinergi antara pelestarian dengan upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan. Tugas dan wewenang ini di olah oleh Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.

Dalam pengelolaan cagar budaya masyarakat bisa berperan pengelolaan Cagar Budaya melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Pokdarwis adalah kelompok yang berdiri dari orang yang peduli dengan kegiatan pariwisata dan berperan dalam pengembangan untuk lingkungan yang mendukung. Tujuan Pokdarwis adalah memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata bersama pemangku kepentingan dalam menerapkan Sapta Pesona. Pokdarwis memperkenalkan dan melestarikan daya tarik wisata serta sebagai mitra pemerintah. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Disporapar Kota Malang sebagai penasihat dalam kegiatan dan perkembangan pariwisata (Rahim, 2012).

Tabel 5: Pokdarwis Kota Malang

Kampung Wisata	Kelurahan	Kecamatan	SK Pokdarwis
Kampung Sanan Tempe	Purwantoro	Blimbing	No : 43/2016.11 Agustus 2016
Kampung Keramik Dinoyo	Dinoyo	Lowokwaru	No : 44/2016.11 Agustus 2016
Kampung Putih Klojen	Klojen	Klojen	No : 62/2017.04 Desember 2017
Kampung Keramat Kasin	Kasin	Klojen	No : 65/2017.04 Desember 2017
Kampung Tridi Kesatrian	Kesatrian	Blimbing	No : 63/2017.04 Desember 2017
Kampung Warna-Warni Jodipan	Jodipan	Blimbing	No : 64/2017.04 Desember 2017
Kampung Budaya Polowijen	Polowijen	Blimbing	No : 85/2017.27 Desember 2017
Kampung Gribig Religius	Madyapuro	Kedung Kandang	No : 67/2017.18 Desember 2017
Kampung Heritage Kajoetangan	Kauman	Klojen	No : 171/2018.17 September 2018
Kampung Gerabah Penanggungan	Penanggungan	Klojen	No : 223/2018.06 Desember 2018
Kampung Biru Arema	Kiduldalem	Klojen	No 172/2018, Tgl 17 September 2018
Kawasan Wisata Panawidjen	Polowidjen	Blimbing	No : 222/2018.06 Desember 2018
Kampung Lampion Wangi	Jodipan	Blimbing	No : 225/2018.06 Desember 2018
Glantung Water Street	Purwantoro	Blimbing	No : 86/2019. 1 Juli 2019
Kampung Rolak Indah	KedungKandang	Kedungkandang	No : 61/2019. 29 April 2019
Kampung Bamboo Mewek Park	Tunjungsekar	Lowokwaru	No : 105/2019. 31 Agustus 2019
Kampung Koeboeran Londho	Sukun	Sukun	No : 117/2019. 27 Oktober 2019
Kampung Terapi Hijau	Sukun	Sukun	No : 118/2019. 27 Oktober 2019
Kampung Satrio Turonggo Jati	Rampal Celaket	Klojen	No : 122/2019. 15 November 2019
Kampung 1000 Topeng	Tlogowaru	Kedungkandang	No : 123/2019. 15 November 2019
Kampung Nilai Silir	Bakalanrajan	Sukun	No : 32/2020. 27 Agustus 2020
Wisata Aeng Hamid Rusdi	Wonokoyo	Kedungkandang	No : 44/2021. 2 Juni 2021
Kampung Karang	Karangbesuki	Sukun	No : 139/2022. 21

Kampung Wisata	Kelurahan	Kecamatan	SK Pokdarwis
Besuki			Juni 2022

Sumber : Dokumen Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata (Disporapar Kota Malang), 2024

Di Kota Malang terdapat 15 Kelompok Sadar Wisata (Pokdariwis), di mana dua di antaranya mengelola Cagar Budaya peninggalan Kolonial Hindia Belanda, yaitu Kampung Heritage Kajoetangan dan Kampung Koeboeran Londho. Salah satu kawasan strategis dalam industri pariwisata adalah Taman Alun-Alun Tugu, sehingga pembentukan Pokdarwis dalam sektor ini dianggap penting. Meskipun beberapa kawasan lain mungkin tidak memiliki potensi pariwisata yang besar, pembentukan kelompok yang bertugas mengelola pelestarian bangunan peninggalan Kolonial Hindia Belanda tetap diperlukan agar nilai sejarah dan kondisi fisik bangunan tersebut terjaga.

Dalam sektor pariwisata Kawasan Kayutangan Strategis menjadi wisata *Heritage* karena kawasan ini saksi perkembangan Kota Malang dari masa kerajaan hingga Kolonial Hindia Belanda. letaknya yang berada di koridor utama menjadi pusat kota membuat kayu tangan relevan hingga saat ini. Dulu kawasan ini terkenal dengan pusat perdagangan dan aktivitas sosial, dimana masyarakat Belanda sering menghabiskan waktu berbelanja dan bersantai. Peninggalan arsitektur dengan gaya *Indische Empire*, *Nieuwe Bouwen*, dan *Neo Gothic* menjadikan kawasan ini menarik sebagai destinasi wisata *heritage*. Kayutangan sebagai simbol menuju jantung Kota Malang yang memancarkan karakter urban dengan bangunan Hindia Belanda dan sejarahnya yang panjang. Keberadaan yang strategis dalam menghidupkan identitas sejarah dan pelestarian Kota Malang (Ridjal, Antariksa, Suryasari, & Triwinarto, 2016).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah menganalisis terbentuknya dan dampak Kebijakan Agraria dan Tebu adalah tidak efektifnya sistem tanam paksa karena berkembangnya ekonomi dan politik liberal. Kebijakan Agraria mengelola lahan tanah milik pemerintah, pribumi, dan swasta dalam komoditas andalan Hindia Belanda. Terutama tebu. Pada masa itu, Hindia Belanda menjadi tempat investor terbesar ketiga di dunia. Dampak lain dari kebijakan Agraria dan Tebu di Kota Malang adalah berdirinya Pabrik Kebon Agung dan Pabrik Krebet. Kebijakan Agraria dan Tebu membuka gerbang migrasi orang Eropa dan berkembangnya daerah strategis komoditas. Perkembangan penduduk yang meningkat membuat perlunya pengelolaan otonomi daerah di daerah strategis komoditas. sehingga, terciptanya Kebijakan Desentralisasi untuk daerah strategis komoditas mengelola sumber daya dan kepentingan daerah masing-masing dengan bentuk kotamadya (*gemeente*).

Kebijakan Agraria, Tebu, dan Desentralisasi berdampak pada 32 daerah strategis komoditas. Salah satunya Kota Malang, dimana dulunya Kota Malang berbentuk distrik (kecamatan) di Kabupaten Malang dinaungi oleh Karesidenan Pasuruan. Distrik Malang terpilih menjadi kotamadya (*gemeente*) karena letak geografi mendukung perkebunan dan suasana mendukung terciptanya pemukiman dan tempat liburan. Setelah pengesahan status kotamadya (*gemeente*) otonomi daerah masih bersifat sebagian karena permasalahan administrasi dan finansial. Kota Malang dipimpin sementara oleh 3 asisten keresidenan. Pembangunan di bawah naungan Karesidenan Pasuruan asisten residen terdiri dari pembangunan kebutuhan dasar dan perencanaan *Bouwplan* I-VIII yang dirancang oleh Ir. Herman Thomas Karsten. Tahun berikutnya pengesahan status kota besar (*Stads Gemeente*) dan diangkatnya walikota Malang resmi secara hukum desentralisasi. Kota Malang dipimpin oleh 4 walikota. Daur hidup organisasi Pemerintah Kota Malang Hindia Belanda pada masa emas di era kepemimpinan H.I Bussemaker karena status kota Malang dan infrastruktur modern di masa itu. Berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda ditandai dengan ekspansi Jepang di Perang Dunia II.

Peninggalan Hindia Belanda dijadikan Cagar Budaya karena sesuai kriteria bangunan berusia di atas 50 tahun dan memiliki karakter Hindia Belanda. Peninggalan Hindia Belanda memiliki nilai sejarah dan

budaya yang perlu dilestarikan. Cagar Budaya harus dilestarikan dan bisa dimanfaatkan dengan mempertahankan bentuk asli bangunan. Pelestarian dan pemanfaatan bangunan cagar budaya di Indonesia dikelola oleh Pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satunya Kota Malang dalam pelestarian dan pemanfaatan peninggalan Kolonial Hindia Belanda dengan menjaga bentuk asli bangunan dan pemanfaatan dalam sektor pariwisata. Dalam sektor pariwisata dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang pada bidang Destinasi dan Industri Pariwisata. Pengelolaan Cagar Budaya sektor pariwisata bidang Destinasi dan Industri Pariwisata menaungi Kelompok Sadar Wisata untuk mengelola cagar budaya yang strategis dalam pariwisata. Cagar Budaya di Kota Malang yang berkembang menjadi wisata yaitu Kawasan Kayutangan karena pusat ekonomi dan sosial era Hindia Belanda.

Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya kebijakan dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media menciptakan sinergitas aktor *pentahelix*. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang interaksi antara kebijakan Agraria, Tebu, dan Desentralisasi dalam mempengaruhi ekonomi, pembangunan, pelestarian cagar budaya. Temuan ini menyoroti pentingnya peran pemimpin lokal dalam menciptakan identitas budaya dan sejarah kota.

Peluang untuk penelitian lebih lanjut tentang hubungan antar kebijakan Pemerintah Hindia Belanda dan dampaknya terhadap pengembangan cagar budaya. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ketersediaan data sejarah yang mungkin tidak lengkap dan aksesibilitas sumber terbatas. Selain itu, perspektif yang diambil dalam penelitian ini lebih banyak berfokus pada sudut Pemerintah dibanding sudut pandang masyarakat lokal secara mendalam. Dalam proses penelitian terbatasnya waktu dan sumber daya dalam pengumpulan data yang relevan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lebih mendalam tentang peran masyarakat dalam pelestarian cagar budaya dan dampak terhadap identitas lokal. Penting untuk mengeksplorasi kebijakan yang dapat diintegrasikan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Penelitian tentang dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan Hindia Belanda terhadap komunitas lokal perlu diperluas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang warisan budaya dan sejarah yang ada saat ini.

REFERENSI

- Mulyadi, L., Witjaksono, A., & Fathony, B. (2020). *Karakteristik Kawasan dan Arsitektur Kota Malang Jawa Timur*. Malang, Jawa Timur, Indonesia: CV. Dream Litera Buana. Retrieved 8 12, 2024, from <http://arsitektur-lalu.com/wp-content/uploads/2020/09/Karakter-Kawasan-Dan-Arsitektur-Kota.Pdf>
- Wicaksono, G. W. (2017, Oktober). Malang Stoomtram Maatschappij Pada Masa Kolonial Di Malang Tahun 1901-1930. *Avatara*, 5, 642-649. Retrieved Agustus 23, 2024, from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/20296>
- Anwari, I. R. (2018). *Sistem Transportasi Darat Perkotaan Surabaya Masa Kolonial 1900-1942* (Vol. 17). Surabaya, Jawa Timur, Indonesia: Mozaik Humaniora. Retrieved Oktober 11, 2024, from <https://ejournal.itenas.ac.id/index.php/rekakarsa/article/download/3640/2814>
- Boerstra, J. (1939). *StadsGemeente Malang 1914-1939*. Surabaya, Jawa Timur, Hindia Belanda: N.V. G. Kolff & Co. Retrieved September 20, 2024, from <https://www.catatannusantara.com/pustaka/jdtmsfhwgyf4mt-eef58-lp7s3-7wpb5-zky5r-2w9jx-h6hdn-9e8r7-18j84>
- Brunner, T., Gunawan, T. N., Susilawati, D., Dewi, V. K., & Andini, S. D. (2018, Mei). Pengelolaan Tata Ruang Pada Bangunan Cagar Budaya di Jalan L.L.R.E Martadinata Bandung. *Jurnal Reka Karsa*, 6. Retrieved Oktober 11, 2024, from <https://ejournal.itenas.ac.id/index.php/rekakarsa/article/download/3640/2814>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

477

Indexed



- Chabibie, M. H., & Permanawiyat, W. (2023). *Statistik Kebudayaan 2023* (Vol. 8). Tangerang Selatan, Banten, Indonesia: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Retrieved Oktober 11, 2024, from https://budbas.data.kemdikbud.go.id/statistik/isi_55797b4c-197d-4108-a450-0e37cfff80.pdf
- Choirunnisak, & Afianto, H. (2022). Gemeente Malang: Keruangan, Segregasi, dan Potensi Wilayah 1914-1940. *Historia Madani*, 6, 154-164. Retrieved September 24, 2024, from <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/historia/article/view/18422>
- Hestiliani, T. (2019, September). Secentralisatie Wet Van Nederland Indies 1903. *Istoria*, 15, 206-214. Retrieved Oktober 2, 2024, from <https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria/article/view/27389>
- Kurniawan, J. (2006, Januari). Perkembangan Kota Malang 1914-1942 : Kajian Intervensi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. *ResearchGate*, 25-104. Retrieved Oktober 10, 2024, from https://www.researchgate.net/publication/324940207_PERKEMBANGAN_KOTA_MALANG_1914-1942_Kajian_Atas_Intervensi_Pemerintahan_Kolonial_Hindia_Belanda
- Malang, P. K. (2024). *Walikota Malang Masa ke Masa*. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Masyrullahushomad, & Sudrajat. (2019, 2). Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa. *Historia*, 7, 159-172. Retrieved 9 11, 2024, from M Sudrajat - HISTORIA, 2019 - download.garuda.kemdikbud.go.id
- Mulyadi, L., Fathony, B., & Priskasari, E. (2020). *Kebijakan Konservasi Heritage*. (T. Setiawan, & R. R. Fadillah, Eds.) Malang, Jawa Timur, Indonesia: CV. Dream Litera Buana. Retrieved September 8, 2024, from <http://arsitektur-lalu.com/wp-content/uploads/2022/07/11.-Buku-Kebijakan-KJT-2020-Kota-Mlg..pdf>
- Mulyadi, L., Witjaksono, A., & Fathony, B. (2020). *Karakteristik Kawasan & Arsitektur Kota Malang Jawa Timur*. Malang, Jawa Timur, Indonesia: CV. Dream Litera Buana. Retrieved Oktober 10, 2024, from <http://arsitektur-lalu.com/wp-content/uploads/2020/09/KARAKTER-KAWASAN-DAN-ARSITEKTUR-KOTA.pdf>
- Rahim, F. (2012). *Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Retrieved Oktober 11, 2024, from https://www.academia.edu/11954462/Pedoman_Kelompok_Sadar_Wisata
- Ridjal, A. M., Antarksa, & Suryas, N. (2016, Desember). Building Form berdasarkan Sejarah Kawasan Bangunan pada Jalan Basuki Rahmat Malang. *RUAS*, 14, 35-40. Retrieved Agustus 12, 2024, from <https://ruas.ub.ac.id/index.php/ruas/article/view/207>
- Rukayah, R. S. (2020). *Konservasi dan Revitalisasi*. Semarang, Jawa Tengah, Indonesia: Undip. Retrieved 9 15, 2024, from https://doc-pak.undip.ac.id/4457/3/BK_Konservasi%26Revitalisasi_SR.pdf
- Saffanah, W. M. (2018, 6 2). Industrialisasi Dan Berkembangnya Kota Malang Pada Awal Abad Ke-20. *Agastya*, 8, 168-179. Retrieved September 7, 2024, from <https://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/2646>
- Susaty, R. (2006). *Penguasaan Tanah dan Ketenagakerjaan di Karesidenan Semarang Pada Masa Kolonial*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial. Retrieved Oktober 11, 2024, from https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/12/penguasaan_tanah_dan_ketenagakerjaan.pdf
- Yuliati. (2012, Februari). Sistem Pemerintahan Wilayah Malang Pada Masa Kolonial. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1, 55-60. Retrieved Oktober 10, 2024, from <https://fis.um.ac.id/2014/02/13/sistem-pemerintahan-wilayah-malang-pada-masa-kolonial>